

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR BINADANA MAKMUR

TAHUN 2020



JL. KH. ABU BAKAR No. 08 RT. 004 RW. 001
SETIADARMA, TAMBUN SELATAN - BEKASI 17510

TELP (021) 82679350

Email : bpr_bdm@yahoo.com

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR BINADANA MAKMUR

Laporan pelaksanaan tata kelola di BPR Binadana Makmur disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2019 :

- A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
- E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
- F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
- G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
- H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- K. Jumlah Penyimpangan Intern
- L. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
- M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal maupun Penerima Dana
- O. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum.

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

- Ketentuan Direksi berdasarkan anggaran dasar perusahaan terdiri dari seorang direktur atau lebih, yang boleh diangkat sebagai anggota direksi hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, masa jabatan direksi sesuai dengan anggaran dasar perseroan adalah 5 tahun, dan mekanisme pengangkatan anggota direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Seorang anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri.
- Jumlah Direksi 2 orang, yaitu 1 orang Direktur Utama dan 1 orang Direktur/ Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- Tidak ada penambahan Direksi selama tahun 2019



dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Ari Zuqnil Fauza	Direktur Utama	16 Juni 2017 s/d 16 Juni 2022
2	Fatimatuz Zahro	Direktur/ Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan	16 Juli 2018 s/d 16 Juli 2023
3	-	Direktur Kepatuhan	-

- **Professionalisme**
 Direktur Utama dan Direktur / Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan saat ini tidak merangkap jabatan di lembaga lainnya baik sebagai direksi, komisaris atau karyawan sehingga benar-benar fokus dalam pengembangan BPR.
- **Pengalaman**
 Direktur Utama dan Direktur / Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah berkecimpung di lembaga keuangan selama kurang lebih 7 tahun
- **Sertifikat kompetensi**
 Direktur Utama memiliki Sertifikasi Kompetensi Direktur BPR, Sertifikasi Kompetensi Direktur BPRS dan Sertifikasi Manajer Cabang Koperasi, sedangkan Direktur / Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki Sertifikasi Direktur BPR.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - 1) Fungsi audit intern;
 - 2) Fungsi manajemen risiko; dan
 - 3) Fungsi kepatuhan
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan

- 2) menunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
 - i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan Evaluasi dan Bantuan Tekhnis SLIK Tanggal 12/04/2019 di Jakarta Diikuti oleh Direktur Utama.
2. Pelatihan Manajemen Risiko Indicator Tanggal 16/04/2019 di Bekasi Diikuti oleh Direktur.
3. Pelatihan Dasar – dasar Perbankan Syariah Tanggal 20-21/08/2019 di Bekasi Diikuti oleh Direktur Utama dan Direktur.
4. Pelatihan Antisipasi Dini Penerapan POJK 33/POJK.03/2018, Penyesuaian dan Penyusunan Kebijakan BPR Tanggal 21/10/2019 di Bekasi Diikuti oleh Direktur.
5. Pelatihan Menyusun Rencana Bisnis BPR Tahun 2020 Tanggal 04/11/2019 Diikuti Oleh Direktur.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

- Ketentuan Dewan Komisaris berdasarkan anggaran dasar perusahaan terdiri dari seorang atau lebih anggota komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. Yang boleh diangkat sebagai anggota komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa jabatan anggota komisaris adalah 5 tahun, dan mekanisme pengangkatannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Seorang anggota komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri.
 - Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 orang, yaitu 1 orang komisaris utama dan 1 orang anggota komisaris.
 - Tidak ada penambahan anggota Komisaris selama 2019.
- sehingga susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Arisson Hendry	Komisaris Utama	16 Juni 2017 sd 16 Juni 2022
2	Indra Setiawan	Anggota Komisaris	16 Juli 2018 sd 16 Juli 2023

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Modal inti PT. BPR Binadana Makmur per 31/12/2019 sebesar Rp. 2.141.162.593,- , sesuai ketentuan POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, tidak wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko.

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham	
	BPR Binadana Makmur	Perusahaan Lain
Ari Zuqnil Fauza	-	-
Fatimatuz Zahro	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Handwritten signature

- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

F. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham		
	BPR Binadana Makmur	BPR Lain	Perusahaan Lain
Arisson Hendry	-	-	-
Indra Setiawan	-	-	-

G. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

- Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham.
- Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris Lainnya, dan Pemegang Saham.

H. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2018.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah keseluruhan gaji	Rp 78.624.000,-	Rp 144.368.000,-
Tunjangan	Rp 12.000.000,-	Rp 123.000.000,-
Tantiem	-	-
Kompensasi berbasis saham	-	-
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	-	-
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	-	Rp. 1.440.000,-



I. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

- a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 1.4 : 1
- b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1.3 : 1
- c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1.1 : 1
- d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 3.3 : 1
- e) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2.3 : 1

J. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat-rapat Dewan Komisaris pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Topik Rapat	Tanggal	Peserta Rapat
1	Evaluasi Kinerja, Pelaksanaan APU-PPT, Pelaksanaan penanganan NPL, Rencana Bisnis BPR, Pelaksanaan system core Banking.	07/01/2019	4 orang
2	Evaluasi Kinerja Januari, Pelaksanaan APU-PPT, Fokus penanganan NPL nasabah yang mempunyai jaminan, Disiapkan data untuk Kantor baru, Disiapkan data untuk Hapus Buku, Draft Perubahan Struktur Gaji untuk Tahun 2019.	01/02/2019	4 orang
3	Evaluasi Kinerja Februari, Progres bisnis Maret, Fokus penanganan nasabah yg ada jaminan, Disiapkan data untuk kantor baru, Disiapkan data Hapus buku, Draft perubahan struktur Gaji Tahun 2019.	01/03/2019	4 orang
4	Evaluasi Kinerja, Persiapan materi dan data untuk RUPS, Disiapkan proposal permohonan pindah kantor pusat BPR ke OJK, Pengajuan nama karyawan yang dipersiapkan untuk PE BPR, Dibuatkan draft Struktur Organisasi BPR	01/04/2019	4 orang
5	Evaluasi Kinerja, Penanganan NPL, Disiapkan data - data pemenuhan tindak lanjut	03/05/2019	4 orang

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA | 2020

BPR BINADANA MAKMUR

	pelaksanaan temuan hasil audit OJK, Disiapkan surat pengajuan ke Divisi Perizinan untuk melaksanakan audiensi terkait konversi Syariah, Dibuatkan SK perubahan struktur Oeganisasi tahun 2019,Membuat Draft ajuan Hapus buku semester I tahun 2019 sebagai tindak lanjut keputusan RUPS.		
6	Evaluasi kinerja, Pelaksanaan APU-PPT, Menyetujui pelaksanaan pindah kantor pusat, Disiapkan rencana anggaran untuk pindah kantor pusat, Disiapkan berkas-berkas untuk pengajuan izin pindah kantor pusat BPR ke OJK, Membuat Laporan ke Pemegang saham terkait hasil audiensi rencana konversi Syariah, Menyetujui draft ajuan Hapus BUKU semester I tahun 2019.	14/06/2019	4 orang
7	Evaluasi Kinerja, Penanganan NPL dan penagihan Hapus Buku, Disiapkan data dan pemenuhan tindak lanjut pelaksanaan temuan hasil audit OJK, Disiapkan berkas- berkas untuk pengajuan izin pindah kantor pusat ke OJK, Menyetujui draft SK untuk pengangkatan Tim Konversi BPRS	05/07/2019	4 orang
8	Evaluasi kinerja, Laporan penanganan NPL dan penagihan hapus buku, Rencana Bisnis Bln Agustus, Disiapkan data dan pemenuhan tindak lanjut hasil temuan audit OJK, Menyusun Rencana pindah kantor pusat BPR, Menyusun Rencana pelatihan Dasar Perbankan Syariah, Disiapkan berkas-berkas untuk pengajuan izin pindah kantor pusat BPR ke OJK.	01/08/2019	4 orang
9	Evaluasi kinerja, Laporan penanganan NPL dan penagihan hapus buku,Disiapkan data pemenuhan tindak lanjut pelaksanaan temuan hasil audit OJK, Menunjuk vendor CV. Fajar Abadi sebagai pelaksana renovasi kantor baru BPR, Menyusun rencana pembuatan study kelayakan untuk proses Konversi Syariah.	04/09/2019	4 orang
10	Evaluasi kinerja, Laporan APU-PPT,Memfollow up berkas pengajuan izin pindah kantor pusat BPR, Menyusun pemenuhan berkas-berkas perbankan Syariah untuk proses Konversi ke BPR Syariah, Mempersiapkan rencana pindah kantor ke nasabah.	04/10/2019	4 orang
11	Evaluasi Kinerja, Laporan APU-PPT, Menyusun pemenuhan berkas-berkas	04/11/2019	4 orang



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA | 2020 BPR BINADANA MAKMUR

	perbankan Syariah untuk proses konversi Syariah, Rencana Pemenuhan modal inti BPR.		
12	Evaluasi Kinerja, Laporan APU-PPT, Menyusun pemenuhan berkas-berkas perbankan Syariah untuk konversi Syariah, Rencana Pemenuhan modal inti BPR.	06/12/2019	4 Orang
	Jumlah Rapat		12 kali

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Arisson Hendry (Komisaris Utama)	12	12	100%
Indra Setiawan (Komisaris)	12	12	100%
Total rapat per tahun	12		

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-



L. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tabel berikut ini menunjukkan pemberian kredit kepada pihak terkait:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
1	-	-	-	-	-

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

No	Nama Penerima	Jumlah (Rp)	Tanggal
1	Sumbangan THR Dinas Kebersihan	Rp. 200.000,-	31/05/2019
2	Sumbangan Pernikahan putri karyawan (Ac. Sugeng)	Rp. 500.000,-	10/06/2019

O. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

(terlampir)

Jakarta, 28 April 2020
PT. BPR Binadana Makmur


Ari Zuqnil Fauza
Direktur Utama


Indra Setiawan
Komisaris